

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Deskriptif Teoritis

Komite sekolah merupakan lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. Komite sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program kerja sekolah, sebelum peneliti menguraikan lebih jauh tentang peran komite sekolah dalam pelaksanaan program kerja sekolah, terlebih dahulu peneliti menjelaskan apa yang dimaksud dengan peranan komite sekolah dalam pelaksanaan program kerja sekolah.

1. Pengertian Peranan Komite Sekolah

Sebelum peneliti menjelaskan lebih jauh makna dari peranan komite sekolah terlebih dahulu penulis mengemukakan masing-masing arti dari peranan komite sekolah.

Peranan adalah “ tindakan seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peranan dianggap penting karena mengatur perilaku seseorang.” (Soerjono soekanto, 2006 : 75). Sedangkan menurut seorang pakar dalam bidang sosial, peranan mencakup tiga hal:

1. Peranan meliputi norma norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.(Levinson, <http://dspace.widyatama.ac.id>).

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan peran itu sangat erat dengan harapan-harapan mengenai perilaku-perilaku yang dianggap pantas. Peranan-peranan ini bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada setiap masyarakat untuk mencapai suatu peranan dalam kehidupan kelompok masyarakat seseorang senantiasa memiliki suatu status sosial, yaitu merupakan kedudukan individu dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.

Jadi, berdasarkan beberapa pendapat dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah suatu kewajiban atau hak yang dapat dilakukan oleh individu-individu maupun suatu kelompok yang memiliki kedudukan tertentu atau yang memegang pimpinan utama dalam suatu peristiwa atau kumpulan harapan yang tertera dalam diri seseorang sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan statusnya didalam masyarakat.

Apabila seseorang menjadi anggota dari sistem sosial (keluarga, perkumpulan, masyarakat keagamaan atau organisasi kerja dan sebagainya), ia memenuhi kewajiban- kewajiban tertentu kepada sistem itu dan sistem sosial tersebut

memberikannya suatu tempat tertentu, hal ini berlangsung timbal balik. Ditetapkannya kedudukan seseorang sebagai anggota berkenaan dengan hirarki dan hak-hak atas kekuasaan yang akan dinikmatinya. Orang juga setuju untuk mengikuti peraturan-peraturan tertentu, menjalankan kegiatan-kegiatan yang diperlukan, bersukarela melakukan pekerjaan dan sebagainya. Sedangkan para anggota lain dalam perkumpulan tersebut mengharapkan dari dirinya sendiri untuk mengerjakan beberapa diantaranya. Sekumpulan harapan ini dan apa yang dikerjakan orang untuk menanggapi dinamakan peranan. Singkatnya, seseorang menduduki jabatan dalam hirarki atau sistem dengan kekuasaan dan hak-hak dan melakukan beberapa fungsi sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan para anggota dan dirinya sendiri. Yang pertama adalah kedudukan atau jabatan, dan kedua adalah peranan.

Menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah

Menurut Paul B. Horton & C. Hunt pengertian “masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut”.

Berdasarkan pendapat tokoh diatas, dapat disimpulkan peranan komite sekolah yaitu suatu kewajiban atau hak yang dapat dilakukan oleh badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Selain itu menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002. Kepala Sekolah sebagai pembina komite sekolah diharapkan dapat mengaktifkan semua jajaran dalam organisasi komite sekolah, khususnya pengurus komite sekolah.

a. Tugas komite sekolah

Tugas utama komite sekolah, khususnya pengurus komite sekolah adalah membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik langsung maupun tidak langsung dengan mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua, masyarakat, dan lingkungan. Pendayagunaan tidak hanya bersifat material keuangan, tetapi bersifat non material seperti pemberian saran dan dukungan pemikiran. Dengan bantuan komite sekolah untuk memperlancar proses pembelajaran, diharapkan kualitas sekolah dan pendidikan dapat ditingkatkan.

b. Bentuk kerjasama antara kepala sekolah dan pengurus komite sekolah

Untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran di sekolah, diperlukan bentuk hubungan dan kerjasama berdasarkan kedudukan sejajar. Kepala sekolah, pengurus komite sekolah dan semua warga sekolah perlu menjalin dan

menjunjung tinggi hubungan kerja yang bersifat kemitraan dan sinergi demi terwujudnya tujuan pendidikan. Ini berarti bahwa kepala sekolah ataupun pengurus komite sekolah dalam menjalankan tugasnya tidak saling mendominasi satu sama lain, tidak saling melanggar wewenang satu sama lain, tapi saling bahu membahu berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

c. Faktor yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah untuk mengaktifkan komite sekolah

Secara umum ada 3 faktor yang berperan dalam menentukan kelancaran dan keberhasilan kegiatan komite sekolah di sekolah yaitu faktor personal, program kerja yang jelas, dan tersedianya dana/anggaran.

a. Personal

1. Pengurus komite sekolah

Aktif/tidak aktifnya kegiatan komite sekolah sangat ditentukan oleh kepedulian komitmen, dan keseriusan pengurus. Oleh karenanya dalam memilih pengurus komite sekolah, perlu disadari dan diperhatikan kriteria sebagai berikut: wawasan yang luas khususnya dalam pendidikan, kepedulian yang tinggi, dukungan terhadap program sekolah, aktif tanpa pamrih, tanggungjawab, kemampuan kerjasama, sabar, dan luwes dalam berkomunikasi.

2. Pemeriksa komite sekolah

Pemeriksa komite sekolah juga memegang peranan penting, dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan komite sekolah. Mereka harus mampu melakukan kontrol. Untuk itu diperlukan pula personil

yang memiliki kriteria tertentu, yaitu: memiliki wawasan yang luas, disiplin, bertanggungjawab, tegas, mau bekerja secara sukarela.

b. Program kerja yang jelas

Kepala sekolah harus mendorong dirumuskan program kerja tahunan oleh pengurus komite sekolah. Agar program kerja benar-benar dapat mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran, kepala sekolah perlu menyampaikan informasi kepada ketua pengurus komite sekolah mengenai: visi, misi sekolah, kondisi, potensi dan berbagai kendala yang ada di sekolah, serta kebutuhan dan harapan/aspirasi seluruh warga sekolah. Selama masa penyusunan program kerja ini perlu diciptakan forum dialog, kepedulian, kebersamaan dan sikap keterbukaan antara pihak sekolah dan pengurus komite sekolah.

c. Sumber dana

Dengan disusunnya program kerja tahunan yang jelas dan terinci, pengurus komite sekolah dapat menghitung perkiraan dana/anggaran yang diperlukan selama setahun dari sumber dana yang dapat diharapkan (RAPBS). Dengan rancangan anggaran inilah kemudian pihak komite sekolah bisa mengambil langkah yang jelas dan transparan dalam mengupayakan pemenuhan anggaran, antara lain melalui iuran atau sumbangan dari orang tua, warga sekolah dan masyarakat luas. Dalam hal ini, kepala sekolah perlu memperhatikan kelayakan usulan, untuk kemudian menyetujuinya bila sesuai dengan program tahunan yang telah disusun.

d. Hal-hal yang harus dilakukan kepala sekolah untuk mengaktifkan komite sekolah

- a. Memperhatikan masa kepengurusan dan melaksanakan pembentukan pengurus komite sekolah secara periodik.

Masa kepengurusan komite sekolah adalah dua tahun pelajaran. Bila dipandang perlu jabatan pengurus dapat dijabat sebanyak-banyaknya untuk dua kali masa jabatan. Kepala sekolah perlu memperhatikan masa kepengurusan ini karena jabatan yang dipegang dalam waktu lebih panjang dapat menimbulkan kebosanan, rutinitas, keterpakuan gagasan dan tindakan yang akibatnya justru kurang menguntungkan bagi kepentingan sekolah.

- b. Ikut aktif dengan melaksanakan program komite sekolah.

Dengan dijiwai semangat menjalankan kemitraan, kepala sekolah perlu ikut aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program pokok komite sekolah bersama-sama dengan pengurus komite sekolah. Sesuai dengan 13 program pokok yang harus dilaksanakan oleh komite sekolah, bentuk partisipasi yang dilaksanakan oleh komite sekolah, bentuk partisipasi yang dilakukan kepala sekolah dapat berupa: pemberian saran, persetujuan, pemantauan, bahkan langsung turun tangan ikut melakukan kegiatan misalnya untuk membina hubungan dan kerjasama yang baik antara orang tua, warga sekolah, warga masyarakat, dan dunia usaha/industri. Kepedulian kepala sekolah ikut menentukan keberhasilan program komite sekolah.

c. Memberdayakan badan pemeriksa komite sekolah.

Pelaksanaan program kerja tahunan oleh pengurus komite sekolah yang telah disetujui oleh kepala sekolah, serta penggunaan dana/anggaran wajib dilaporkan secara berkala oleh pengurus komite sekolah (minimal enam bulan sekali). Setiap laporan harus diteliti oleh Badan Pemeriksa komite sekolah sebagai pembina komite sekolah, perlu mendorong terciptanya dan terlaksananya mekanisme dan tindakan pemeriksaan agar penyimpangan dapat segera diatasi. Bahkan kepala sekolah juga perlu memberi peluang pada Badan Pemeriksa untuk sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan (pemeriksaan mendadak) sebagai upaya meningkatkan ketertiban administrasi dan pembukuan keuangan. Bila ditemukan penyimpangan, kepala sekolah perlu mendukung dilakukannya penelitian secara seksama oleh Badan Pemeriksa untuk menemukan permasalahan yang terjadi (delik temuan).

d. Melibatkan pengurus komite sekolah dalam setiap kegiatan sekolah.

Kelancaran pelaksanaan kegiatan sekolah perlu mendapat dukungan dari komite sekolah tidak saja secara material pendanaan, tapi juga secara non material. Kepala sekolah dapat meningkatkan peran serta pengurus komite sekolah dengan cara meningkatkan komunikasi dua arah. Melalui komunikasi ini diharapkan pengurus komite sekolah dapat lebih memahami sasaran yang ingin dicapai sekolah dan anak didik, dan selanjutnya berusaha lebih keras untuk membantu terlaksananya kegiatan sekolah.

- e. Melakukan pembinaan dan pemantauan secara aktif dan berkala.

Melalui komunikasi dua arah kepala sekolah tidak saja dapat menyampaikan harapan-harapan dan aspirasinya, tetapi juga sekaligus melakukan pembinaan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan komite sekolah. Komunikasi dapat ditingkatkan melalui forum yang dengan sengaja diadakan oleh kepala sekolah, diluar acara rapat anggota komite sekolah di sekolah.

e. Kriteria keberhasilan komite sekolah

Pada setiap akhir tahun ajaran sekolah, pengurus komite sekolah harus membuat laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan untuk diserahkan kepada kepala sekolah selaku pembina komite sekolah. Untuk menilai tentang keberhasilan komite sekolah dalam menjalankan perannya, dapat digunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Terlaksananya program kerja tahunan

Komite sekolah dapat dikatakan berhasil bila program kerja tahunan yang disusun dan telah mendapatkan pengesahan dari kepala sekolah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ingin dicapai. Selain itu dalam pelaksanaannya dapat menggunakan dana yang tidak melebihi dari dana yang telah dianggarkan.

- b. Keterlibatan pengurus komite sekolah dalam kegiatan sekolah

Keterlibatan pengurus dapat dinilai dari kehadiran mereka dalam rapat pengurus, dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang memerlukan kehadiran mereka, dan keaktifan mereka dalam menjalankan tugas.

c. Keterlibatan anggota komite sekolah dalam kegiatan sekolah

Anggota komite sekolah terdiri atas orang tua, kepala sekolah, guru, dan anggota masyarakat. Komite sekolah dapat dikatakan berhasil bila dalam menjalankan tugasnya untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan dapat melibatkan pihak-pihak tersebut. Keterlibatan dapat diupayakan tidak saja dalam bentuk dana yang dapat diserap, tetapi juga kepedulian dan perhatian / rapat dan mematuhi peraturan yang ditertibkan oleh sekolah.

d. Banyaknya potensi dan partisipasi orang tua yang dapat dihimpun

Potensi dan partisipasi dari orang tua atau masyarakat dapat digali dalam bentuk uang, material, maupun sumbangan pemikiran dan tenaga. Namun perlu diperhatikan oleh kepala sekolah bahwa dalam usaha menghimpun potensi tersebut komite sekolah harus bersikap fleksibel dan tidak memaksa.

e. Pemanfaatan lingkungan dalam kegiatan pembelajaran

Komite sekolah seyogyanya juga mampu memanfaatkan fasilitas dan potensi yang ada di lingkungan bagi kegiatan pembelajaran. Misalnya mengundang ahli dibidang tertentu untuk menjadi narasumber, atau membantu mengupayakan kesempatan magang atau observasi di perusahaan-perusahaan bagi siswa berprestasi.

f. Meningkatkan kinerja personil sekolah berkat partisipasi aktif pengurus komite sekolah, sehingga berdampak positif pada prestasi siswa.

Komite sekolah yang aktif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan personil sekolah, yang kemudian diharapkan dapat lebih

meningkatkan kinerja mereka, dan selanjutnya memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas sekolah, khususnya prestasi siswa.

2. Pengertian Program

Menurut Suharsimi Arikunto, Program adalah sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, suatu program merupakan kegiatan yang direncanakan dan diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu.

Lebih lanjut Arikunto menyebutkan program dapat bermacam-macam wujudnya ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya :

1. Ditinjau dari tujuannya, program ada yang kegiatannya mencari keuntungan dan ada yang sukarela
2. Ditinjau dari jenis, ada program pendidikan, program kemasyarakatan, dan sebagainya yang pengklasifikasiannya didasarkan pada isi kegiatan tersebut
3. Ditinjau dari jangka waktu, ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang
4. Ditinjau dari keluasannya, ada program sempit yang terikat pada variabel tertentu, dan program luas yang menyangkut banyak variabel.
5. Ditinjau dari pelaksana, ada program kecil yang hanya dilaksanakan beberapa orang saja, dan program besar yang pelaksanaannya melibatkan banyak orang
6. Ditinjau dari sifatnya, ada program penting yaitu program yang dampaknya menyangkut nasib orang banyak mengenai hal yang vital, dan

program kurang penting yaitu program yang dampaknya tidak begitu berpengaruh terhadap kepentingan orang banyak atau kebalikan dari program penting.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa program adalah kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan wujud dari program tersebut.

3. Pengertian Kerja

Kerja memiliki arti Pengeluaran energi untuk kegiatan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan, Sukasto mendefinisikan kerja sebagai Sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai profesi, sengaja dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Sedangkan menurut Sudjarwo, kerja adalah kegiatan yang dilakukan orang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan. Dalam kamus bahasa Indonesia kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu yang dilakuka (diperbuat) untuk mencari nafkah yang memerlukan tenaga fisik.

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan kerja adalah pengeluaran energi untuk kegiatan yang dianggap sebagai profesi, yang sengaja dilakukan untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu.

4. Pengertian Sekolah

Sekolah merupakan tempat dimana anak dapat mendapatkan pendidikan formal. Banyak berbagai macam lembaga pendidikan, namun kebanyakan

lembaga pendidikan formal hanya tersedia tidak cukup banyak di di suatu daerah.

Pengertian Sekolah adalah sistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik (Wayne dalam Atmodiwiro, 2000:37). Sedangkan berdasarkan undang-undang no 20 tahun 2003 sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

Menurut Daryanto (1997:544), sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sedangkan Menurut Hadari Namawi (1985:25) bahwa “ Sekolah adalah organisasi kerja sebagai wadah kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan”. Dengan kata lain sekolah adalah salah satu bentuk ikatan kerjasama sekelompok orang yang bermaksud mencapai suatu tujuan yang di sepakati bersama.

Jadi, sekolah sebagai suatu sistem sosial dibatasi oleh sekumpulan elemen kegiatan yang berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan sosial sekolah yang demikian bersifat aktif kreatif artinya sekolah dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang terdidik.

Dari definisi tersebut bahwa sekolah adalah suatu lembaga atau organisasi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Sebagai suatu organisasi sekolah memiliki persyaratan tertentu.

Sekolah adalah suatu lembaga atau tempat untuk belajar seperti membaca, menulis dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan

bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya. (Zanti Arbi dalam buku Pidarta, 1997:171).

Sekolah berperan dalam lembaga pendidikan maupun dalam lembaga sosial. Peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki anak-anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara individual maupun secara masyarakat.

Menurut Hadari Namawi (1985:27) Peranan sekolah sebagai lembaga Sosial adalah :

1. Membantu anak-anak memperoleh pengetahuan, keterampilan dan bahkan keahlian yang diperlukan untuk mencari nafkah hidup masing-masing kelak setelah dewasa.
2. Membantu anak-anak mempelajari cara-cara menyelesaikan masalah kehidupan, baik sebagai masalah individu maupun masalah masyarakat.
3. Membantu anak-anak mengembangkan sosialitas masing-masing agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan bersama dalam bentuk masyarakat yang dinamis dan sebagai warga Negara suatu bangsa.

a. Sekolah sebagai Pusat Pendidikan Formal

Sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang disertai kewajiban memberi pendidikan. Perangkat ini dikelola secara formal, mengikuti haluan yang pasti dan diberlakukan di

masyarakat bersangkutan. Sekolah merupakan lembaga social yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Lembaga social formal tersebut bisa disebut sebagai suatu organisasi, yaitu terikat kepada tata aturan formal, berprogram dan bertarget atau bersasaran yang jelas, serta memiliki struktur kepemimpinan penyelenggaraan atau pengelolaan yang resmi.

Gambaran sekolah sebagai pendidikan formal terlihat pada tujuan institusional, yaitu tujuan kelembagaan pada masing-masing jenis dan tingkatan sekolah. Di Indonesia dikenal lembaga pendidikan formal prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan atas yang terdiri dari sekolah menengah umum dan kejuruan dan perguruan tinggi dengan aneka ragam bidangnya. Tujuan institusional untuk masing-masing tingkat dan atau jenis pendidikan, pencapaiannya ditopang oleh tujuan-tujuan kurikuler dan tujuan-tujuan instruksional. Baik tujuan instruksional, kurikuler, maupun institusional kesemuanya diarahkan kepada pembentukan pribadi dan kemampuan warga masyarakat sebagaimana yang menjadi target atau sasaran pendidikan di masyarakat.

b. Hubungan sekolah dan Masyarakat

Secara etimologis, “hubungan masyarakat” diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris “public relation”, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi (sekolah) dengan masyarakatnya. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat

untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah.

Berdasarkan teori-teori dan pendapat tokoh diatas dapat disimpulkan, program kerja sekolah adalah serangkaian kegiatan yang akan dilakukan yang membutuhkan energi untuk mencapai tujuan tertentu di lembaga pendidikan.

5. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan yang ditandai adanya otonomi luas ditingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional (tim Bapenas Bank Dunia, 1999:10) Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51 ayat 1 menyatakan "Pengelolaan satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah.

Penjelasan pasal 51 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Manajemen Berbasis Sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu komite sekolah dalam mengelola pendidikan.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah sebuah sistem pengelolaan yang memberikan

kewenangan yang luas kepada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri. Pemberian kewenangan yang luas tersebut merupakan realisasi pelaksanaan konsep desentralisasi di bidang pendidikan pada tingkat terdepan yaitu sekolah. Kewenangan yang luas ini diberikan tetap dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional yang ada sehingga sekolah tidak berkembang semauanya sendiri. Manajemen berbasis sekolah menekankan agar pihak sekolah mengikutsertakan masyarakat secara intensif dan ekstensif sesuai dengan peran dan potensi masing-masing.

Manajemen berbasis sekolah dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang dikantor pusat dan daerah. manajemen berbasis sekolah adalah salah satu strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat, dan daerah ketingkat sekolah. Dengan demikian manajemen berbasis sekolah pada dasarnya merupakan sistem manajemen dimana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. Manajemen berbasis sekolah memberikan pengendalian yang lebih besar bagi kepala sekolah, guru serta Komite sekolah dalam proses pengelolaan pendidikan dalam satuan pendidikan. Manajemen berbasis sekolah dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para murid. Dengan demikian pada dasarnya Manajemen berbasis sekolah adalah upaya dalam memandirikan sekolah dengan mendayagunakan kemampuan yang ada pada sekolah.

a. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan agar sekolah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah dapat menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi siswa. Misalnya, sekolah menjadi lebih bermutu, nilai ujian sekolah/nasional menjadi lebih baik, sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar, menjadikan sekolah tempat guru berkarier dan mengabdikan diri. Untuk mencapai tujuan ini sekolah perlu diberi kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya sekolah. Dengan manajemen berbasis sekolah sekolah dapat merencanakan pengembangan sekolah, mengelola sumber daya sekolah sendiri, mengembangkan staf lebih optimal dan mengikutsertakan masyarakat lebih aktif lagi dalam pengelolaan.

b. Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah

Prinsip dalam melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah ialah sekolah harus memperhatikan 10 prinsip sebagai berikut:

1. Keterbukaan, artinya pengelola sekolah harus terbuka terhadap semua perolehan dan penggunaan sumber daya sekolah kepada semua pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah sama terbukanya seperti perolehan dan penggunaan dana. Artinya, siapa saja yang ingin mengetahui apa yang dikerjakan sekolah harus diperbolehkan; dan tidak ada yang ditutup-tutupi sekolah. Misalnya sekolah menempel RAPBS dan laporan-laporan kegiatan pada papan pengumuman sekolah.

2. Kebersamaan, artinya pengelolaan sekolah dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat, mungkin diwakili komite sekolah memberikan masukan-masukan dan juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sekolah.
3. Keberlanjutan, artinya ada kesinambungan dalam pengelolaan sekolah. Adanya keterkaitan antara kebijakan yang lalu dengan kebijakan sekarang. Segala sesuatu tidak dimulai dengan nol.
4. Menyeluruh, artinya pengelolaan sekolah harus mencakup seluruh komponen yang mempengaruhi keberhasilan sekolah. Tidak seperuh-separuh, tetapi melihat saling keterkaitan antar komponen yang dikelola. Misalnya kalau meningkatkan kemampuan guru, maka tidak lupa meningkatkan kesejahteraannya juga.
5. Pertanggungjawaban, artinya bahwa pengelola sekolah harus menyiapkan pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan tindakannya baik pada saat diminta maupun tidak diminta. Paling tidak setiap tahun sekali ada laporan pelaksanaan kegiatan apa yang menjadi tanggungjawab pengelola, bersedia diperiksa, ditanya dan memberikan penjelasan mengenai perihal yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Demokratis, artinya setiap keputusan yang dibuat dilaksanakan atas dasar musyawarah antara pihak sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan antara sekolah dan masyarakat perlu diselenggarakan sesering mungkin sesuai dengan urgensi yang timbul.
7. Kemandirian, artinya sekolah mampu berdiri sendiri dan tidak banyak menggantungkan diri pada bantuan pihak lain. Dalam kemandirian,

sekolah memiliki inisiatif dan inovasi dalam rangka mencapai tujuan sekolah.

8. Berorientasi mutu, artinya sekolah melaksanakan tugas dan fungsinya tidak asal-asalan, tetapi selalu mengupayakan hasil pekerjaan yang terbaik bagi stakeholder. Dalam hal ini sekolah selalu merencanakan peningkatan-peningkatan di semua bidang dari waktu ke waktu. Misalnya, sekolah mengupayakan mutu lulusan yang lebih baik, pelayanan sekolah yang semakin baik.
9. Pencapaian SPM, artinya pengelola selalu berusaha agar standar pelayanan minimal dapat dipenuhi secara keseluruhan secara bertahap dan berkelanjutan.
10. Pendidikan untuk semua, artinya pengelola tidak membedakan kesempatan untuk dilayani oleh sekolah. Karena semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Keberhasilan Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah Keberhasilan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sangat tergantung pada:

1. Dukungan, komitmen, dan kesungguhan untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah.
2. Stakeholders (masyarakat, pemerintah daerah kabupaten/kota) mendukung pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Oleh karena itu para stakeholders harus terlebih dulu mendapat sosialisasi manajemen berbasis sekolah. Kepada mereka diperkenalkan konsep manajemen berbasis sekolah dan alasan-alasan mengapa sekolah harus melakukan

manajemen berbasis sekolah serta keuntungan yang akan diperoleh dengan melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Tanpa dukungan stakeholders manajemen berbasis sekolah akan sulit diterapkan karena salah satu ciri dalam manajemen berbasis sekolah adalah partisipasi masyarakat.

3. Kemampuan melaksanakan pembaharuan

Melaksanakan manajemen berbasis sekolah berarti sekolah meninggalkan sistem pengelolaan yang lama dan memulai dengan cara mengelola yang baru. Ini berarti sekolah akan menjalani proses pembaharuan. Sekolah harus sadar bahwa sesuatu yang baru itu belum tentu akan langsung diterima. Oleh karena itu harus memiliki kemampuan untuk mengadakan pembaharuan.

4. Nilai tambah manajemen berbasis sekolah

Dukungan kepada sekolah akan lebih besar lagi apabila sekolah dengan melaksanakan manajemen berbasis sekolah dapat menunjukkan adanya nilai tambah bagi masyarakat.

5. Kemampuan pengembangan potensi

Sekolah dapat memberikan pelayanan pendidikan yang dapat mengembangkan potensi anak secara maksimal dengan memperhatikan perbedaan individu siswa.

6. Dukungan terhadap visi

Lingkungan sosial sekolah mendukung pencapaian visinya. Melaksanakan manajemen berbasis sekolah memerlukan dukungan dari berbagai pihak terutama sekali Komite Sekolah, Sekolah/Badan

Peranserta Masyarakat. Organisasi pendukung tersebut diharapkan ada pada tingkat sekolah, desa yang dibentuk bersama oleh sekolah, orangtua siswa dan masyarakat sekitar untuk mencapai visi dan sasaran yang telah ditentukan bersama.

7. Potensi Sumber daya sekolah

Potensi sumber daya sekolah dan masyarakat mendukung tercapainya target yang ditetapkan. Partner Dewan Pendidikan Dalam manajemen berbasis sekolah Dewan pendidikan perlu menyadari pihak-pihak lain yang mungkin dapat dijadikan partner dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Mereka itu adalah:

- a. Legislatif
- b. Pengambil Kebijakan
- c. Perencana (Bappeda)
- d. Perguruan Tinggi
- e. Lembaga Diklat
- f. Praktisi (Kepala sekolah, guru)
- g. Masyarakat

c. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

Adapun penerapan manajemen berbasis sekolah yang efektif secara spesifik mengidentifikasikan beberapa manfaat antara lain sebagai berikut (Kathleen, ERIC Digest, Downloaded April 2002) :

- 1) Memungkinkan orang-orang yang kompeten disekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran
- 2) Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting

- 3) Mendorong munculnya kreatifitas dalam merancang bangun program pembelajaran
- 4) Mengarahkankembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan disetiap sekolah
- 5) Mengembangkan rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program sekolah
- 6) Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru disemua level

Penerapan manajemen berbasis sekolah dalam sistem pemerintahan yang masih cenderung terpusat tentulah masih banyak pengaruhnya. Perlu diingatkan bahwa penerapan manajemen berbasis sekolah akan sangat sulit jika para pejabat pusat dan daerah masih bertahan untuk menggenggam sendiri kewenangan yang seharusnya didelegasikan kepada pihak sekolah.

Pemerintah Pusat, dalam rangka pemeliharaan kesatuan Republik Indonesia, tentu saja menjalankan politik kependidikan secara nasional. Pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang antara lain mencakup standar kompetensi, standar fasilitas dan peralatan sekolah, standar kepegawaian, standar kualifikasi guru dan sebagainya. Sedangkan penerapan standar disesuaikan dengan keadaan daerah.

Standar ini kemudian dioperasionalkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan sekolah-sekolah didaerahnya. Namun pemerintah pusat dan daerah harus lebih rela untuk memberi kesempatan bagi setiap sekolah yang tetap siap untuk menaerapkannya secara kreatif dan inovatif. Jika tidak, sekolah akan tetap tidak berdaya dan guru akan terpasung kreatifitanya untuk berinovasi.

Pemerintah harus mampu memberikan bantuan jika sekolah tertentu mengalami kesulitan menerjemahkan visi pendidikan yang ditetapkan daerah menjadi program-program pendidikan yang berkualitas tinggi. Pemerintah daerah masih juga bertanggung jawab untuk menilai standar sekolah yang telah ditetapkan. Misalnya mengenai bahan pelajaran, sementara bagi yang lain mungkin akan masih menetapkan sendiri buku pelajaran yang akan dipakai dan yang akan digunakan seragam disemua sekolah.

Makna otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap lingkungan setempat. Masyarakat dituntut partisipasinya agar mereka dapat lebih memahami kompleksitas pendidikan, membantu serta mengontrol pengelolaan pendidikan. Adanya otonomi dalam pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para personel, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan disekolah. Beberapa hambatan yang kebingunan dihadapi pihak-pihak berkepentingan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak berminat untuk terlibat
- 2) Tidak efisien
- 3) Pikiran kelompok
- 4) Memerlukan pelatihan
- 5) Kebingunan atas peran dan tanggung jawab baru
- 6) Kesulitan koordinasi

7) Manajemen berbasis sekolah dan prestasi belajar murid

Manajemen berbasis sekolah dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. manajemen berbasis sekolah merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah.

Edmond, (2000:76-77) mengemukakan berbagai indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen berbasis sekolah antara lain:

- 1) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib
- 2) Sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai
- 3) Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat
- 4) Adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah untuk berprestasi
- 5) Adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK
- 6) Adanya evaluasi yang terus-menerus sesuai tuntutan IPTEK
- 7) Adanya evaluasi yang terus-menerus
- 8) Adanya komunikasi dan dukungan yang intensif dari orang tua

Para pendukung manajemen berbasis sekolah berpendapat bahwa prestasi belajar murid lebih mungkin akan meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan di sekolah dari pada tingkat daerah. Para sekolah cenderung lebih peka dan sangat mengetahui kebutuhan murid dan sekolah dari pada para birokrat di tingkat pusat atau daerah. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa

reformasi pendidikan yang bagus sekalipun tidak akan berhasil jika para guru yang harus menerapkannya tidak berperan serta merancanakannya.

Untuk dapat melaksanakan manajemen berbasis sekolah di sekolah maka perlu disusun beberapa hal sebagai berikut:

1. Program sekolah
2. Strategi pengelolaan SDM sekolah
3. Pengembangan kurikulum
4. Sistem pengelolaan kesiswaan
5. Sistem Pengelolaan keuangan
6. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana
7. Pengembangan kemitraan antara sekolah dan masyarakat.
8. Sistem monitoring dan evaluasi.

Dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah perlu disusun program sekolah. Program sekolah adalah seperangkat kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan sekolah untuk mencapai suatu kondisi tertentu yang diinginkan. Program ini disusun dengan mempertimbangkan atau analisis situasi dan kondisi sekolah yang terdiri dari: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki atau dihadapi sekolah Program ini disusun dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
2. Orangtua atau wali siswa
3. Tokoh masyarakat
4. Tokoh Agama

5. Wakil siswa
6. Pengawas
7. Pakar pendidikan setempat

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan program sekolah adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi dan tujuan sekolah (perubahan yang diinginkan secara bersama untuk dicapai beberapa tahun ke depan). Visi ini disusun dengan memperhatikan dan tidak bertentangan dengan visi pendidikan nasional, provinsi, dan daerah.
2. Menetapkan misi sekolah, yaitu seperangkat tindakan untuk mencapai visi sekolah yang telah dirumuskan bersama tersebut.
3. Menetapkan tujuan sekolah, yaitu dengan menjabarkan visi sekolah ke dalam tujuan operasional (dapat diamati dan dapat diukur).
4. Menetapkan target sekolah, yaitu menjabarkan tujuan ke dalam besaran-besaran kegiatan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Misalnya, meningkatnya nilai rata-rata ujian sekolah/nasional dari 4 menjadi 6 dalam waktu 3 tahun.

Kesimpulannya adalah bahwa program sekolah terdiri dari visi/misi sekolah dan tujuan serta seperangkat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target yang jelas serta penganggarnya. Selanjutnya untuk melaksanakannya disusun suatu program kerja yang menggambarkan didalamnya apa, oleh siapa dan kapan program sekolah tersebut dilaksanakan dan bagaimana memantau pelaksanaan program tersebut. Program sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang secara rinci diuraikan dalam modul Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Menyusun Strategi Pengelolaan SDM Pengelolaan Sumber Daya manusia merupakan

suatu tindakan pembinaan dan pendayagunaan SDM sekolah dan sekitarnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekolah. Dua hal yang ditekankan di sini yaitu aspek pembinaan dan aspek pendayagunaan. Pembinaan SDM adalah upaya-upaya berkesinambungan yang dilakukan sekolah secara terarah dan terprogram agar sumber daya manusia sekolah dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan sekolah yang telah disepakati bersama.

Kerjasama antara sekolah dan masyarakat adalah kegiatan sekolah yang melibatkan masyarakat baik secara individual maupun secara organisasi dengan prinsip sukarela, saling menguntungkan dan memiliki kepentingan bersama dalam suatu wadah dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan mendayagunakan potensi masyarakat dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kerjasama tersebut dilaksanakan baik secara terjadwal, terencana dan berkesinambungan melalui pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat maupun pihak-pihak terkait lainnya maupun secara insidental sesuai dengan keperluan, misalnya dengan melakukan kunjungan ke rumah tokoh masyarakat.

B. Kerangka Pikir

Otonomi pendidikan berfokus pada pemberian wewenang kepada satuan pendidikan atau satuan sekolah mengelola pendidikan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai standar pendidikan. Pengelolaan ini

melibatkan semua unsur-unsur yang ada dalam satuan pendidikan yang dipimpin oleh seorang manajer atau kepala sekolah serta keterlibatan terhadap Komite sekolah yang merupakan badan mandiri yang bergerak dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan.

Komite sekolah sebagai badan mandiri yang bergerak dalam menyukseskan penyelenggaraan pendidikan memiliki peran-peran yang harus dilakukan agar semua unsur dalam pendidikan berdaya guna dan berhasil guna mencapai standar yang telah ditetapkan. Adapun peran Komite sekolah dalam menyelenggarakan pemberdayaan pendidikan sesuai Surat Keputusan Menteri pendidikan Nasional (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003) meliputi : memberikan bantuan secara finansial, tenaga serta fikiran dalam penyelenggaraan pendidikan, serta memberikan pertimbangan dalam penentuan dan kebijakan pendidikan, dukungan, pengontrolan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan, serta sebagai mediator antara Eksekutif dan Legislatif/DPRD dan masyarakat.

Selain itu, hal yang dapat dilakukan oleh Komite sekolah yang bermitra terhadap Kepala sekolah adalah mengelola tenaga kependidikan, mengelola kesiswaan, mengelola sarana dan prasarana, serta hubungan baik terhadap masyarakat. Untuk lebih jelasnya, kerangka diatas dapat digambarkan dalam suatu paradigma penelitian seperti di bawah ini:

